

## BAB IV

### PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil analisis data kemudian pembahasan, serta menjawab permasalahan dari masalah yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Dalam hal ini mengenai pemberitaan kasus “Penolakan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta” di media [Republika.co.id](http://Republika.co.id) ditinjau dari segi objektivitas.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan empat konstruksi kategori untuk menjelaskan mengenai objektivitas berita sebagai alat pembedah dari permasalahan. Dari dua konstruksi kategori utama yaitu faktualitas dan imparsialitas tersebut terbagi menjadi empat Konstruksi Sub-Kategori seperti :

1. Kebenaran (*truth*). Terdiri dari faktualitas yaitu pemisahan konten berita antara fakta, opini, campuran keduanya, dan bukan fakta dan opini, akurasi kesesuaian dengan fakta atau peristiwa yang sebenarnya, dan kelengkapan semua fakta dan peristiwa jyang diberitakan dari keseluruhannya.
2. Relevan (*relevance*). Terdiri dari *relative salience* yang menjelaskan tentang kerelevanan berita untuk diangkat dan diberitakan kepada masyarakat, dan *relative priority* yang menjelaskna mengenai penting dan tidak penting berita ditimbang dari letaknya dan judul berita.
3. Berimbang ( *Balance*). Menjelaskan akses proporsional apakah masing-masih pihak diberikan kesempatan yang sama atau tidak. Kemudian *cover both side*

mengenai berapa sudut pandang dalam setiap berita dan apakah disajikan atau tidak.

4. Netralitas. Menjelaskan cara dan sikap wartawan dalam membuat sebuah berita, apakah non-evaluatif berita tidak memberitakan *judgment personal* dan aspek non-sensasional dimana sebuah berita tidak dilebih-lebihkan dan dikurangi fakta yang ada.

Dalam penelitian ini dipilih tiga koder yang akan menganalisis sampel yaitu Hadrus Salam (peneliti), Bobby Agung Prasetyo, Dede Arip Rahman. Ketiga pengkoding adalah yang mempunyai pengetahuan mengenai ilmu jurnalistik. Ketiga koder diantaranya Hadrus Salam yang juga sebagai peneliti. Kemudian, Dede Arip Rahman sebagai koder kedua, pernah menjadi seorang jurnalis di Galamedia dan sekarang menjadi jurnalis di Koran Sindo sebagai Wartawan foto serta Bobby Agung Prasetyo sebagai koder ketiga, menjabat sebagai Ketua Umum pers Suara Mahasiswa di Universitas Islam Bandung. Alasan pemilihan koder diatas, mempertimbangkan pengetahuan dan pengalaman pengkoder dalam melakukan peliputan berita juga pengalaman sebagai seorang jurnalis. Kemudian, dari ketiganya setidaknya sudah mengetahui aspek-aspek dalam meliput, membuat dan menerbitkan berita. Dengan demikian, adanya kekeliruan persepsi dapat diminimalkan.

## 4.1 Analisis Data Hasil Penelitian

### 4.1.1 Uji Reliabilitas Koding Kategori Kebenaran

#### 4.1.1.1 Sub Kategori Faktualitas

Hasil pengukuran terhadap sub kategori faktualitas dalam berita penolakan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta di media [Republika.co.id](http://Republika.co.id), dengan menguji sampel sebanyak sepuluh berita. Pada kategori faktualitas ini unit analisis yang dipakai adalah analisis per kalimat atau paragraf dari sepuluh sampel berita yang diujikan. Hasil perhitungannya sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Republika.co.id : Konstruksi Kategori Kebenaran**  
**(Sub-Kategori Faktualitas)**

Kategori	Coder			Σ
	Hadrus	Bobby	Dede	
Fakta	19	16	15	50
Opini	4	3	9	16
Campuran Fakta dan Opini	20	24	19	62
Bukan Fakta dan Bukan Opini	0	0	0	0
Σ	43	43	43	129

Dengan menggunakan rumus koefisien Kontingensi Pearson's (C) diperoleh nilai  $X^2$  (Chi Kuadrat) sebesar 2,4397. Dengan terlihatnya hasil  $X^2$  maka dapat dilihat indeks reliabilitasnya, sebagai berikut:

$$C = \frac{\chi^2}{(n + \chi^2)} C = 2,4397 : (129 + 2,4397) \quad IRC = (1 - C) \times 100 \%$$

$$= 2,4397 : 131,4397$$

$$= 0,0185$$

$$\text{IRC} = (1 - 0,0185) \times 100\%$$

$$= 0,9815 \times 100\%$$

$$= 98,15\%$$

Hasil yang didapat dengan menggunakan rumus Indeks Reliabilitas Koding (IRC) sebesar 98,15 %, maka kesepakatan antar pelaku koding mengenai penolakan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam sub kategori faktualitas adalah sangat tinggi. Dengan demikian data yang diperoleh valid dan layak menjadi indikator alat ukur objektivitas berita penolakan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam sub kategori faktualitas.

#### 4.1.1.2 Sub Kategori Akurasi

Hasil pengukuran terhadap sub kategori akurasi dalam berita penolakan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta sebanyak sepuluh berita, dalam kategori ini unit analisis yang dipakai adalah per satuan berita, bukan lagi kalimat atau paragraf. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Republika.co.id : Konstruksi Kategori Kebenaran (Sub-Kategori Akurasi)

Konstruksi Kategori akurasi	Coder			Σ
	Hadrus	Bobby	Dede	
Positive	9	10	8	27
Less	1	0	2	3
Negative	0	0	0	0
Σ	10	10	10	30

Dengan menggunakan rumus koefisien Kontingensi Pearson's (C) diperoleh nilai  $X^2$  (Chi Kuadrat) sebesar 1. Dengan terlihatnya hasil  $X^2$  maka dapat dilihat indeks reliabilitasnya, sebagai berikut:

$$C = \frac{\chi^2}{(n + \chi^2)}$$

$$C = 1 : (30 + 1)$$

$$C = 1 : 31$$

$$C = 0,0322$$

$$IRC = (1 - C) \times 100\%$$

$$IRC = (1 - 0,0322) \times 100\%$$

$$IRC = (0,9678) \times 100\% = 96,78\%$$

Hasil yang didapat dengan menggunakan rumus Indeks Reliabilitas Koding (IRC) sebesar 96,78%, maka kesepakatan antar pelaku koding mengenai penolakan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam sub kategori akurasi adalah juga sangat tinggi. Dengan demikian data yang diperoleh valid dan layak menjadi indikator alat ukur objektivitas berita penolakan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam sub kategori akurasi.

#### 4.1.1.3 Sub Kategori Kelengkapan

Hasil pengukuran terhadap sub kategori kelengkapan dalam berita penolakan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan sepuluh sampel berita yang diujikan, Unit analisis yang dipakai adalah per satuan berita dan hasilnya sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Republika.co.id : Konstruksi Kategori Kebenaran**  
**(Sub-kategori Kelengkapan)**

Konstruksi Kategori Kelengkapan	Coder			$\Sigma$
	Hadrus	Bobby	Dede	
Lengkap	8	4	7	<b>19</b>

Tidak Lengkap	2	6	3	<b>11</b>
$\Sigma$	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>30</b>

Dengan menggunakan rumus koefisien Kontingensi Pearson's (C) diperoleh nilai  $X^2$  (Chi Kuadrat) sebesar 2,9464. Dengan terlihatnya hasil  $X^2$  maka dapat dilihat indeks reliabilitasnya, sebagai berikut:

$$C = \frac{\chi^2}{(n + \chi^2)}$$

$$C = 2,9464 : (30 + 2,9464)$$

$$C = 2,9464 : 32,9464$$

$$C = 0,0894$$

$$IRC = (1 - C) \times 100 \%$$

$$IRC = (1 - 0,0894) \times 100 \%$$

$$IRC = 0,9106 \times 100 \%$$

$$IRC = 91,03 \%$$

Hasil yang didapat dengan menggunakan rumus Indeks Reliabilitas Koding (IRC) sebesar 91,03%, maka kesepakatan antar pelaku koding mengenai penolakan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam sub kategori kelengkapan adalah sangat tinggi. Dengan demikian data yang diperoleh valid dan layak menjadi indikator alat ukur objektivitas berita penolakan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam sub kategori Kelengkapan.

#### 4.1.2 Uji Reliabilitas Koding Kategori Relevansi

##### 4.1.2.1 Sub Kategori *Relative Salience*

Kategori ini menguji apakah memang relevan berita semacam ini diangkat pada masa sekarang, jika dibandingkan dengan isu lain. Apakah sekadar *blow up* tidak penting, artinya masih ada isu lain yang mestinya jauh lebih penting untuk

diangkat. Dalam kategori ini unit analisis yang dipakai adalah per satuan berita, hasil perhitungan IRC sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Republika.co.id : Konstruksi Kategori Relevansi**  
 (Sub-Kategori *Relative Salience*)

Konstruksi Kategori <i>Relevance</i> <i>Salience</i>	Coder			Σ
	Hadrus	Bobby	Dede	
Relevan	8	6	7	13
Tidak Relevan	2	4	3	17
Σ	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>30</b>

Dengan menggunakan rumus koefisien Kontingensi Pearson's (C) diperoleh nilai  $X^2$  (Chi Kuadrat) sebesar 0,9522. Dengan terlihatnya hasil  $X^2$  maka dapat dilihat indeks reliabilitasnya, sebagai berikut:

$$C = \frac{\chi^2}{(n + \chi^2)}$$

$$C = 0,9522 : (30 + 0,9522)$$

$$= 0,9522 : 30,9522$$

$$= 0,0307$$

$$IRC = (1 - C) \times 100 \%$$

$$IRC = (1 - 0,0307) \times 100 \%$$

$$= (0,9693) \times 100 \%$$

$$= 96,93 \%$$

Hasil yang didapat dengan menggunakan rumus Indeks Reliabilitas Koding (IRC) sebesar 96,93 %, maka kesepakatan antar pelaku koding mengenai penolakan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam sub kategori *Relative Salience* adalah sangat tinggi. Dengan demikian data yang diperoleh valid dan layak menjadi indikator alat ukur objektivitas berita penolakan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam sub kategori *Relative Salience*.

#### 4.1.2.2 Sub Kategori *Relative Priority*

Kategori *relative priority* bertujuan untuk menguji apakah berita yang di sajikan republika.co.id memang berita yang penting untuk disajikan kepada masyarakat, dengan menimbang letaknya, ilustrasinya, judul dan subjudulnya, apakah berita ini memang dipentingkan oleh media *online* atau tidak. unit analisis yang dipakai adalah per satuan berita, dengan perhitungan IRC sebagai berikut :

Tabel 4.5

**Republika.co.id : Konstruksi Kategori Relevansi  
(Sub-Kategori *Relative Priority*)**

Konstruksi Kategori <i>Relevance Priority</i>	Coder			Σ
	Hadrus	Bobby	Dede	
Penting	8	6	7	21
Kurang Penting	1	2	3	6
Tidak Penting	1	2	0	3
Σ	20	10	10	30

Dengan menggunakan rumus koefisien Kontingensi Pearson's (C) diperoleh nilai  $X^2$  (Chi Kuadrat) sebesar 3,2856. Dengan terlihatnya hasil  $X^2$  maka dapat dilihat indeks reliabilitasnya, sebagai berikut:

$$C = \frac{\chi^2}{n + \chi^2}$$

$$= \frac{3,2856}{30 + 3,2856}$$

$$= \frac{3,2856}{33,2856}$$

$$= 0,9013$$

$$IRC = (1 - C) \times 100 \%$$

$$IRC = (1 - 0,9013) \times 100\%$$

$$= (0,9013) \times 100\%$$

$$= 90,13 \%$$

Hasil yang didapat dengan menggunakan rumus Indeks Reliabilitas Koding (IRC) sebesar 90,13 %, maka kesepakatan antar pelaku koding mengenai penolakan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam sub kategori *Relative Priority* adalah sangat tinggi. Dengan demikian data yang diperoleh valid dan layak menjadi indikator alat ukur objektivitas berita penolakan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam sub kategori *Relative Priority*.

#### 4.1.3 Uji Reliabilitas Koding Kategori Berimbang

##### 4.1.3.1 Sub Kategori Proporsional

Kategori ini bertujuan menguji apakah media *online* *republika.co.id* mengemas berita ini dengan seimbang dari masing-masing pihak dan sisi telah diberikan kesempatan yang sama. Sehingga penyajian informasi berimbang dan adil tidak berpihak pada pihak yang diberitakan. Unit analisis yang dipakai per satuan berita, dengan perhitungan IRC sebagai berikut.

Tabel 4.6

**Republika.co.id: Konstruksi Kategori Berimbang  
(Sub-Kategori Proporsional)**

Konstruksi Kategori Proporsional	Coder			$\Sigma$
	Hadrus	Bobby	Dede	
Proporsional	3	4	2	9
Tidak Proporsional	7	6	8	21
$\Sigma$	10	10	10	30

Dengan menggunakan rumus koefisien Kontingensi Pearson's (C) diperoleh nilai  $X^2$  (Chi Kuadrat) sebesar 14,2856. Dengan terlihatnya hasil  $X^2$  maka dapat dilihat indeks reliabilitasnya, sebagai berikut:

$$C = \frac{\chi^2}{(n + \chi^2) C} = 14,2856 : (30 + 14,2856) \quad IRC = (1 - C) \times 100\%$$

$$= 14,2856 : 44,2856 \quad IRC = (1 - 0,3225) \times 100\%$$

$$= 0,3225 \quad = (0,6775) \times 100\%$$

$$= 67,75\%$$

Hasil yang didapat dengan menggunakan rumus Indeks Reliabilitas Koding (IRC) sebesar 67,75% maka kesepakatan antar pelaku koding mengenai penolakan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam sub kategori Proporsional adalah tinggi. Dengan demikian data yang diperoleh valid dan layak menjadi indikator alat ukur objektivitas berita penolakan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam sub kategori Proporsional.

#### 4.1.3.2 Sub Kategori *Cover Both Side*

Kategori ini adalah menguji apakah semua narasumber yang terlibat dalam suatu peristiwa harus dilibatkan dalam keterangannya, adanya sudut pandang yang ditampilkan baik itu satu atau dua dari pihak yang berkonflik dalam pemberitaan. Unit analisis yang dipakai adalah per satuan berita, dengan perhitungan IRC sebagai berikut.

Tabel 4.7

**Republika.co.id : Konstruksi Kategori Berimbang**  
(Sub-Kategori *Cover Both Side*)

Konstruksi Kategori <i>cover both side</i>	Coder			Σ
	Hadrus	Bobby	Dede	
Satu Sudut Pandang/pihak	9	8	9	26
Dua Sudut Pandang/pihak	1	2	1	4
Σ	10	10	10	30

Dengan menggunakan rumus koefisien Kontingensi Pearson's (C) diperoleh nilai  $X^2$  (Chi Kuadrat) sebesar 0,5778. Dengan terlihatnya hasil  $X^2$  maka dapat dilihat indeks reliabilitasnya, sebagai berikut:

$$C = \frac{\chi^2}{(n + \chi^2)} C = 0,5778 : (30 + 0,5778) \quad IRC = (1 - C) \times 100\%$$

$$= 0,5778 : 30,5778 \quad IRC = (1 - 0,0188) \times 100\%$$

$$= 0,0188 \quad = 0,9811 \times 100\% = 98,11\%$$

Hasil yang didapat dengan menggunakan rumus Indeks Reliabilitas Koding (IRC) sebesar 98,11%, maka kesepakatan antar pelaku koding mengenai penolakan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam sub kategori *Cover both side* adalah sangat tinggi. Dengan demikian data yang diperoleh valid dan layak menjadi indikator alat ukur objektivitas berita penolakan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam sub kategori *cover both side*.

#### 4.1.4 Uji Reliabilitas Koding Kategori Netralitas

##### 4.1.4.1 Sub Kategori Non-Evaluatif

Kategori yang bertujuan menguji apakah berita tidak memberikan penilaian atau *judgement*, yaitu ada atau tidaknya pencampuran opini dari wartawan pada kasus ini. Hasil pengukuran terhadap sub kategori Non-Evaluatif dalam berita Penolakan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta dimedia Republika.co.id dengan unit analisis per satuan berita, sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Republika.co.id : Konstruksi Kategori Netralitas**  
**(Sub-kategori Non-Evaluatif)**

Konstruksi Kategori Non-Evaluatif	Coder			Σ
	Hadrus	Bobby	Dede	
Evaluatif	1	0	1	2
Non Evaluatif	9	10	9	28
Σ	10	10	10	30

Dengan menggunakan rumus koefisien Kontingensi Pearson's (C) diperoleh nilai X<sup>2</sup> (Chi Kuadrat) sebesar 1,0817. Dengan terlihatnya hasil X<sup>2</sup> maka dapat dilihat indeks reliabilitasnya, sebagai berikut:

$$C = \frac{\chi^2}{(n + \chi^2)} C = 1,0817; (30 + 1,0817)$$

$$= 1,0817 : 31,0817$$

$$= 0,0348$$

$$IRC = (1 - C) \times 100 \%$$

$$IRC = (1 - 0,0348) \times 100\%$$

$$= 0,9652 \times 100 \%$$

$$= 96,52 \%$$

Hasil yang didapat dengan menggunakan rumus Indeks Reliabilitas Koding (IRC) sebesar 96,52%, maka kesepakatan antar pelaku koding mengenai penolakan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam sub kategori *non-evaluatif* adalah sangat tinggi. Dengan demikian data yang diperoleh valid dan layak menjadi indikator alat ukur objektivitas berita penolakan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam sub kategori *non-evaluatif*.

#### 4.1.4.2 Sub Kategori Non-Sensasional

Kategori yang mencoba menguji apakah berita yang diberitakan mengenai penolakan ahok ini tidak dilebih-lebihkan fakta yang diberitakannya dan adanya kesesuaian judul dengan isi. Hasil pengukuran terhadap sub kategori Non-Sensasional dalam berita Penolakan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta dimedia Republika.co.id dengan unit analisis per satuan berita, sebagai berikut:

**Tabel 4.9**

**Republika.co.id : Konstruksi Kategori Netralitas  
(Sub-kategori Non-Sensasional)**

Konstruksi Kategori non sensasional	Coder			$\Sigma$
	Hadrus	Bobby	Dede	
sensasional	4	6	4	<b>15</b>
Non sensasional	6	4	6	<b>15</b>
$\Sigma$	10	10	10	<b>30</b>

Dengan menggunakan rumus koefisien Kontingensi Pearson's (C) diperoleh nilai  $X^2$  (Chi Kuadrat) sebesar 0,9382. Dengan terlihatnya hasil  $X^2$  maka dapat dilihat indeks reliabilitasnya, sebagai berikut:

$$C = \frac{\chi^2}{(n + \chi^2)}$$

$$C = 0,9382: (30 + 0,9382)$$

$$= 0,9382: 30,9382$$

$$= 0,0303$$

$$IRC = (1 - C) \times 100 \%$$

$$IRC = (1 - 0,0303) \times 100\%$$

$$= 0,9697 \times 100$$

$$= 96,97\%$$

Hasil yang didapat dengan menggunakan rumus Indeks Reliabilitas Koding (IRC) sebesar 96,97%, maka kesepakatan antar pelaku koding mengenai penolakan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam sub kategori Non-Sensasional adalah sangat tinggi. Dengan demikian data yang diperoleh valid dan layak menjadi indikator alat ukur objektivitas berita penolakan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam sub kategori non-Sensasional.

Dari semua hasil perhitungan Indeks Reliabilitas Coding di atas, keempat kategori uji dengan sembilan indikatornya dinyatakan valid dan layak menjadi indikator alat ukur Objektivitas media *republika.co.id* dalam pemberitaan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta. Merujuk pada hasil temuan diatas, maka dalam analisis deskriptif data penelitian semua kategori di sajikan untuk mengetahui presentase perhitungan tabel frekuensi yang diambil dari salah seorang koder.

#### 4.2 Analisis Deskriptif Data Penelitian

Dalam tahap ini akan dibahas mengenai analisis deskriptif mengenai objektivitas penolakan Ahok Sebagai Gubernur DKI Jakarta dilihat dari kategori-kategori yang jadi pembedah penelitian seperti kategori kebenaran (faktualitas, akurasi, kelengkapan), kategori relevansi (*relative salience, relective priority*), kategori berimbang (proporsional, *cover both side*) dan kategori Netralitas (non evaluatif, non-sensasional). Dari kategori-kategori diatas akan dibahas menurut

temuan tabel frekuensi yang datanya diambil dari salah satu koder, yaitu peneliti sendiri. Data frekuensi ini akan berbentuk dalam persen (%), bagi tiap alat ukur di tiap sub kategori. Data yang diambil sebagai tabel frekuensi adalah data yang sudah lolos Indeks Reabilitas Koding (IRC). Adapun hasil dari IRC yang telah dirangkum dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

**Tabel 4.10**  
**Indeks Realibilitas Koding (IRC)**

No.	Kategori	Sub-Kategori	Unit Analisis	Indeks Realibilitas Koding (IRC)	Keputusan
1	Kebenaran	Faktualitas	Kalimat, paragraf	98,15 %	Lolos
2		Akurasi	Berita	96,78%	Lolos
3		Kelengkapan	Berita	91.03 %	Lolos
4	Relevansi	<i>Relative Salience</i>	Berita	96,93 %	Lolos
5		<i>Relative Priority</i>	Berita	90,13 %	Lolos
6	Berimbang	Proporsional	Berita	67,75%	Lolos
7		<i>Cover both side</i>	Berita	98,11%	Lolos
8	Netralitas	Non- Evaluatif	Berita	96,52%	Lolos
9		Non- Sensasional	Berita	96,97%	Lolos

Tabel 4.10 di atas merupakan hasil dari penghitungan Indeks Reabilitas Koding (IRC), di mana presentase yang sudah ditetapkan antara 60%-80% adalah presentase yang tinggi dan 80%-100% adalah presentase yang sangat tinggi. Jadi, dengan demikian dapat ditetapkan bahwa semua uji IRC bagi sampel pada media *online* dinyatakan lolos. Dalam analisis tabel frekuensi ini semua kategori lolos Indeks Reabilitas Koding (IRC), sehingga semua kategorinya akan dihitung berdasarkan temuan dan dibahas dalam pembahasan.

## 4.2.1 Kategori Kebenaran

### 4.2.1.1 Sub Kategori Faktualitas Pemberitaan penolakan Ahok Sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam Media Republika.co.id

Pada sub kategori faktualitas memiliki alat ukur yang telah diklasifikasikan ke dalam empat indikator uji yakni, fakta, opini, campuran akta dan opini dan bukan campuran fakta dan opini. Unit analisis yang dipakai pada kategori ini adalah per kalimat atau paragraf dari semua berita yang dijadikan sampel penelitian.

**Tabel 4.11**

**Republika.co.id : Tabel Frekuensi Kategori Kebenaran (sub-kategori Faktualitas)**

<b>Kk Faktualisasi Media Republika.co.id</b>	<b>F</b>	<b>%</b>
Fakta	20	46,51%
Opini	4	9,30%
Campuran	19	44,19%
Bukan Opini Dan Fakta	0	0%
Jumlah	43	100%

Keterangan kalimat yang mengandung fakta adalah jika berita di atas mengandung unsur kejadian yang sesuai dan kenyataan yang ada. Kalimat yang mengandung opini atau komentar, jika terdapat pernyataan atau komentar seseorang yang mengandung unsur subyektivitas. Kalimat disebut sebagai campuran fakta dan opini apabila terdapat unsur fakta dan opini dan kalimat tidak disebut sebagai campuran fakta dan opini apabila tidak terdapat fakta dan opini didalamnya.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa paragraf yang mengandung fakta dalam berita adalah sebesar 46,51%, kemudian data opini yang didapat adalah 9,30%, data campuran antara fakta dan opini sebesar 44,19% dan paragraf yang bukan campuran antara fakta dan opini adalah 0%. Dari hasil di atas dapat dikatakan bahwa berita yang mengandung fakta dominan dengan 46,51% lebih besar dibandingkan dengan hasil campuran antara fakta dan opini yaitu 44,19% yang hampir sama besarnya. Hasil yang didapat dari perhitungan salah satu koder dinyatakan bahwa [Republika.co.id](http://Republika.co.id) sudah melakukan pemberitaan yang objektif menurut aspeknya yaitu kebenaran yang berisi paragraf fakta yang dominan.

Meskipun demikian, dengan hasil perolehan campuran fakta dan opini yaitu sebesar 44,19% dianggap bahwa [Republika.co.id](http://Republika.co.id) masih mencampurkan fakta dan opini dalam paragraf berita dari kesepuluh sampel yang sudah dipilih. Pada indikator fakta, dapat dilihat bahwa keseluruhan berita dari sepuluh sampel mengandung informasi fakta sebesar 46,51 %. Contoh bagian kalimat dari salah satu berita yang memuat fakta dalam pemberitaan penolakan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam media *online* [Republika.co.id](http://Republika.co.id) ialah, "*Pemberitahuan sudah kami terima, besok mereka akan menggelar unjuk rasa di DPRD,*" ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto, Selasa (30/9)".

Paragraf di atas adalah salah satu dari potongan berita yang mengandung fakta. Paragraf tersebut dapat diklasifikasikan menjadi fakta dikarenakan termasuk paragraf yang menyatakan ucapan orang lain sebagai narasumber dalam berita ini.

Dalam buku Barus (2010:27) fakta itu baru dapat disebut sebagai berita jika dibuat menjadi kesadaran umum dengan melaporkannya. Fakta itu tidak ada yang berdiri sendiri, maksudnya adalah sebuah fakta itu selalu dapat dihubungkan dengan fakta yang ada dalam suatu peristiwa lain.

Kemudian menurut Santosa, kepala Republika perwakilan jabar (hasil wawancara,10/04/2015), bahwa aspek kebenaran dalam sebuah berita adalah mutlak *“aspek kebenaran mutlak. Sekali media memberitakan kebohongan, selamanya tak akan dipercaya lagi oleh masyarakat”*. Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa Republika selalu memberitakan fakta sesuai dengan kebenaran yang ada tanpa melebih-lebihkan dan mengurangi fakta yang ada dan berpegang teguh pada kode etik yang sudah ditetapkan. Sebuah berita akan menjadi berita yang berbobot apabila didalamnya terkandung fakta tanpa ada opini dari wartawannya.

Kemudian terdapat indikator opini, adapun contoh dari berita yang memuat opini dalam pemberitaan penolakan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam media *online* Republika.co.id

*“Ribuan orang dari Gerakan Masyarakat Jakarta menggelar aksi unjuk rasa hingga penutupi Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat mendesak Plt. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mundur. Massa juga menggunakan jalan sebagai tempat duduk mendengarkan orasi yang disampaikan sejumlah pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam yang menilai Ahok sebagai musuh Islam”*.

Paragraf di atas adalah salah satu potongan berita yang mengandung opini. Opini yang dimaksud bukanlah opini dari narasumber lain dan bukan narasumber yang bersangkutan, akan tetapi opini yang dibuat oleh media itu sendiri atau

wartawan. Sedangkan, dalam suatu pemberitaan sangat dihindari atau lebih tepatnya tidak diperbolehkannya memasukkan opini wartawan maupun opini dari media itu sendiri. Setiap wartawan dalam kondisi apapun seharusnya tetap mengedepankan kebenaran dari pada opininya sendiri terhadap kasus tertentu yang mempunyai kedekatan emosi yang sama dengan wartawan tersebut. Temuan di atas menunjukkan bahwa kalimat dari beberapa berita [republika.co.id](http://republika.co.id) hanya 9,30 % atau empat kalimat saja yang mengandung opini.

Dalam kode etik jurnalis muslim yang menyebutkan juga bahwa seorang jurnalis muslim harus menginformasikan atau menyampaikan yang benar, juga tidak merekayasa atau memanipulasi fakta (Romli, 2003: 41). Sehingga pada dasarnya seorang wartawan harus tetap memperjuangkan kebenaran untuk tetap disampaikan kepada khalayak. Hasil temuan kalimat yang masih dicampuradukkan antara fakta dan opini sangat besar dimana dalam temuan terdapat sekitar 44,19 % atau 19 kalimat yang mengandung campuran fakta dan opini. Hal ini seharusnya dihindari oleh wartawan atau media yang bersangkutan, agar memenuhi syarat objektivitas dalam sebuah berita haruslah berisikan fakta tanpa opini.

Kebenaran adalah aspek dari objektivitas, sehingga jurnalis atau pers dianggap objektif apabila memberitakan kebenaran, seperti menurut Assegaff (1983:130), bahwa objektivitas adalah “menceritakan keadaan sebenar-benarnya dan bagaimana kejadian yang dituliskan itu berlangsung’. Dari teori tersebut dilihat bahwa seorang jurnalis harus menceritakan informasi sesuai yang terjadi dilapangan apa dan bagaimana tanpa ada opini yang disisipkan. Secara

keseluruhan, dari hasil temuan tabel frekuensi diatas aspek kebenaran telah memenuhi syarat objektivitas dimana besaran fakta dominan ketimbang sub-indikator yang lainnya.

#### 4.2.1.2 Sub Kategori Akurasi Pemberitaan penolakan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam Republika.co.id

Untuk sub kategori akurasi memiliki alat ukur yang telah diklasifikasikan ke dalam tiga indikator, yakni *positive*, *less*, dan *negative*. Unit analisis yang dipakai pada kategori ini adalah per satuan berita.

**Tabel 4.12**

**Republika.co.id : Tabel Frekuensi Kategori Kebenaran (sub-kategori Akurasi)**

Kk Akurasi Media Republika.co.id	F	%
Positive	9	90%
Less	1	10%
Negative	0	0%
Jumlah	10	100%

Keterangan berita yang dianggap “positif” jika memuat keterangan saksi yang diungkapkan jati dirinya secara lengkap. Berita dianggap “less” jika memuat keterangan saksi yang tidak diungkapkan jati dirinya dan Berita dianggap “negative” jika tidak memuat keterangan saksi sama sekali.

Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa berita yang disampaikan oleh media *Online Republika.co.id* didominasi dengan berita-berita yang positif. Positif disini bukan dari jenis atau sifat beritanya, namun dari kelengkapan sebuah berita yang

menampilkan keterangan saksi yang diungkapkan jati dirinya secara lengkap. Hasil diatas 90% berita yang mengungkapkan semua saksi dalam berita sehingga positif untuk di beritakan kepada khalayak agar tidak diragukan lagi kebenarannya. Kemudian 10 % hasil perhitungan diatas menunjukkan “less”, dimana disini maksudnya adalah tidak menampilkan jati diri saksi secara lengkap tetapi masih ada saksi yang disebutkan, serta 0% hasil “negative” menunjukkan bahwa tidak ada berita yang tidak memuat pernyataan dari saksi. Salah satu contoh paragraf yang menyatakan keterangan saksi adalah sebagai berikut.

*“Koordinator Gerakan Masyarakat Jakarta, KH Fakhurrozi Ishaq mengatakan belasan ulama itu merupakan perwakilan dari Forum Umat Islam (FUI), Front Pembela Islam (FPI), Front Betawi Rembuk (FBR), Gerakan Reformasi Islam, Dewan Dakwah Islamiyah, dan kelompok Majelis Taklim di Jakarta. Kepada Wakil Ketua DPR, Fakhurrozi menjelaskan alasan Gerakan Masyarakat Jakarta menolak Ahok sebagai gubernur bukan cuma karena masalah agama.*

*“Ahok buat kesalahan, naikkan PBB dengan adanya ancaman, gaji guru dipotong sekarang. Belum masalah agama dan lain-lain,” kata, Selasa (28/10).”*

Dalam berita diatas disebutkan dengan jelas narasumber dari koordinator GMJ yang saat itu sedang melakukan demonstrasi di depan Gedung DPRD. Jati diri dari narasumber di ungkapkan saat melakukan wawancara. Dimana proses wawancara berguna untuk mendapatkan informasi berita. Narasumber yang disebutkan dalam berita tersebut sangat berhubungan dengan berita mengenai kasus penolakan Ahok ini. Pada dasarnya pernyataan dari seorang narasumber yang relevan harus dikutip dengan tepat dan tanpa dilebihkan serta dikurangi agar fakta dan kesesuaian tetap terjaga dari pernyataan narasumber.

Kemudian contoh dari “less” atau paragraf yang tidak mengungkapkan jati diri narasumber secara lengkap namun, masih ada narasumbernya, *“Mereka juga*

*meminta pemerintah segera usir Ahok dari Jakarta."Usir Ahok dari Jakarta dan batalkan pengangkatannya sebagai gubernur," kata pendemo. Jika itu dilakukan, maka, menurut mereka, Jakarta akan menjadi aman tanpa Ahok."*

Paragraf diatas dilihat bahwa itu merupakan sebuah pernyataan namun, jati diri dari narasumber tidak diungkapkan dengan lengkap siapa dan sebagai apa. Seharusnya wartawan harus tetap mencantumkan jati diri secara lengkap agar pernyataan yang dibuat sebagai berita memang pernyataan dari narasumber yang relevan dengan kasus yang sedang terjadi, bukan dari ucapan orang yang memang tidak relevan jati dirinya. Menurut Barus (2010:54) menyebutkan bahwa sumber berita merupakan siapa yang dinilai mempunyai posisi mengetahui atau berkompeten terhadap suatu fakta, peristiwa atau kejadian.

Dari pernyataan Barus disebutkan bahwa yang relevan menjadi seorang narasumber adalah yang mempunyai posisi serta berkompeten terhadap fakta dari sebuah peristiwa. Meskipun demikian, berita tersebut tetap menyebutkan jati diri narasumber yaitu pendemo yang berada pada pihak yang menolak Ahok untuk dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta, meskipun jati diri dari narasumber tidak diungkap secara lengkap sehingga termasuk kedalam indikator Less.

Dalam prinsip jurnalistik Islam juga disebutkan bahwa setidaknya seorang jurnalis harus memiliki sifat *shidqu* (jujur) dalam memberitakan kebenaran dan tidak berat sebelah. Kemudian ada *amanah* (dapat dipercaya) dimana seorang jurnalis harus bisa dapat dipercaya dengan selalu menjaga kepercayaan (Zakiah,2013). Dalam jurnalistik seorang narasumber boleh meminta identitasnya

tidak di publikasikan juga boleh dipublikasikan tergantung pada kesepakatan pada proses wawancara dan pendekatan yang dilakukan seorang jurnalis. Dalam kasus ini wartawan tidak langsung mewawancarai dan hanya mengutip dari orasi pendemo sehingga jati dirinya tidak diketahui sebagai apa dan siapa, hal itu juga bisa diragukan kebenarannya.

Secara keseluruhan kategori akurasi telah memenuhi syarat objektivitas karena presentase yang dominan adalah presentasi indikator positif sebesar 90% dan hanya 10% saja berita yang tidak mengungkap jati diri narasumber dengan lengkap.

#### **4.2.1.3 Sub Kategori Kelengkapan Pemberitaan Penolakan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam Republika.co.id**

Untuk sub kategori kelengkapan, memiliki alat ukur yang telah diklasifikasikan ke dalam dua indikator, yakni Lengkap (mengandung unsur 5W+1H) dan tidak lengkap (tidak mengandung unsur 5W+1H). Unit analisis yang dipakai pada kategori ini adalah per satuan berita.

**Tabel 4.13**

**Republika.co.id : Tabel Frekuensi Kategori Kebenaran (sub-kategori kelengkapan)**

<b>Kk Kelengkapan Media Republika.co.id</b>	<b>F</b>	<b>%</b>
Lengkap	8	80%
Tidak Lengkap	2	20%
Jumlah	10	100%

Keterangan Berita yang dianggap “lengkap” jika unsur 5W+1H dilengkapai dalam beritanya dan berita dianggap “tidak lengkap” jika tidak memuat unsur 5W+1H didalam beritanya

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Republika.co.id sebagai sebuah media *online* yang bernilaiikan Islami dan sebagai media umat, telah memenuhi syarat objektivitas dimana republika.co.id tetap memperhatikan unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah berita yaitu kelengkapan berita. Menurut hasil temuan, berita yang memiliki kelengkapan unsur 5w dan 1H, sebanyak 80% berita dari 10 sampel, sedangkan 20% masih belum lengkap unsur dari beritanya.

Contoh paragraf lengkap yang memuat 5W+1H dari sepuluh sampel berita media Republika.co.id sebagai berikut.

*“Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta anggota organisasi Front Pembela Islam (FPI) yang berunjuk rasa menolak kepemimpinannya jangan sampai merusak citra umat Islam Indonesia.*

*"Jangan memermalukan umat Islam Indonesia yang dikenal toleran. Saya bisa terpilih menjadi Bupati Belitung Timur dengan jumlah penduduk muslim 93 persen," katanya saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta, Rabu."*

Contoh yang dipaparkan diatas adalah salah satu contoh paragraf dari delapan sampel berita yang menerapkan 5W+1H secara lengkap. Pola 5W+1H merupakan sebuah aturan penulisan yang paling sering dipakai dalam sebuah proses jurnalistik. Pola tersebut berfungsi untuk memberikan informasi yang jelas kepada pembaca mengenai informasi yang terjadi, kapan, tentang apa, dimana, bagaimana dan mengapa bisa terjadi.

Dari temuan di atas terdapat 20% berita masih belum lengkap, yaitu berita “Ahok: FPI Jangan Rusak Citra Islam di Indonesia” dan berita “Haji Lulung Ancam Angkat Gubernur Tandingan Jika Ahok Dilantik”. Kedua berita di atas dianggap tidak lengkap karena keduanya tidak melengkapi poin yang harus dicantumkan seperti tempat kejadian atau tempat wawancara serta kapan terjadinya peristiwa tersebut juga tidak dicantumkan. Hal ini penting untuk memberikan informasi kepada khalayak tempat dilakukannya wawancara agar lebih menjelaskan apakah wawancara dilakukan secara langsung dengan jawaban narasumber yang cenderung spontan dalam menjawab atau melalui proses wawancara tanpa tatap muka yang bisa saja diragukan jawabannya.

Dalam Zakiah (2013) disebutkan istilah *tabligh* yang harus dimiliki seorang jurnalis islam, yaitu menyampaikan apa yang harus disampaikan, sehingga kelengkapan informasi dalam sebuah berita adalah hak informasi warga yang harus dipenuhi sebagai sebuah hak yang memang harus disampaikan.

Untuk kategori kelengkapan, berdasarkan hasil temuan dapat dikatakan bahwa [republika.co.id](http://republika.co.id) tetap memperhatikan kelengkapan informasi dan memenuhi syarat objektivitas. Temuan di atas didominasi berita yang lengkap dengan presentase 80% atau delapan berita meski, masih terdapat 20% atau dua berita yang masih belum lengkap informasinya.

Secara keseluruhan dilihat dari kategori kebenaran dengan sub-kategori faktualitas, akurasi serta kelengkapan berita, media *online* [republika.co.id](http://republika.co.id) tetap memperhatikan aspek tersebut dan memenuhi syarat objektivitas sebuah media. Meskipun ada beberapa yang masih belum lengkap dan memiliki presentasi yang

lumayan besar. Namun, dari ketiganya didominasi oleh temuan-temuan yang layak untuk dijadikan syarat objektivitas sebuah media yaitu, berita yang berisikan fakta-fakta yang ada, berita yang menampilkan jati diri narasumbernya dan mengandung pola 5W+1H yang lengkap.

#### 4.2.2 Kategori Relevansi

##### 4.2.2.1 Sub Kategori *Relative Salience* Pemberitaan penolakan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam [Republika.co.id](http://Republika.co.id)

Untuk sub kategori *Relative Salience* memiliki alat ukur yang telah diklasifikasikan ke dalam dua indikator, yakni relevan dan tidak relevan. Relevan maksudnya adalah isu yang diberitakan memang penting untuk diangkat dibandingkan dengan isu-isu lain pada masa pemberitaan. Berita yang tidak relevan adalah isu yang diberitakan memang tidak penting untuk diangkat dibandingkan dengan isu-isu yang lain pada masa pemberitaan. Unit analisis yang dipakai pada kategori ini adalah per satuan berita.

**Tabel 4.14**

**Republika.co.id : Tabel Frekuensi Kategori Relevansi (*Relevance Salience*)**

<b>Kk <i>Relative Salience</i> Media <a href="http://Republika.co.id">Republika.co.id</a></b>	<b>F</b>	<b>%</b>
Relevan	8	80%
Tidak Relevan	2	20%
Jumlah	10	100%

Keterangan berita yang dianggap “relevan” adalah jika isu yang diberitakan memang penting untuk diangkat dibandingkan dengan isu-isu lain pada masa pembuatannya. Berita dianggap “tidak relevan” jika isu yang

diberitakan tidak penting untuk diungkap dibandingkan dengan isu-isu lain pada masa pembuatannya.

Jika dilihat dari hasil diatas, menunjukkan bahwa 80% Republika.co.id membuat berita yang penting untuk diketahui oleh khalayak, dan sebanyak 20% masih tidak relevan untuk diberitakan karena menyangkut beberapa kepentingan serta ketidakseimbangan dalam isi berita atau hanya untuk memenuhi deadline saja dengan isi yang kurang relevan. Banyak media memberitakan kasus ini karena menyedot perhatian banyak kalangan, baik itu dari kalangan agama seperti MUI, dari DPRD, pejabat, para ahli dan aktivis pada bidangnya juga masyarakat umum. Hal ini membuat banyak media fokus dalam memberitakan kasus ini termasuk Republika.co.id. Bagi Republika.co.id kasus ini juga penting karena republika sebagai media umat yang lekat dengan agama Islam harus bisa menyampaikan informasi tanpa ada unsur emosi didalamnya dan hanya memberitakan fakta secara objektif.

Dalam buku (Romli 2003 :42) menyebutkan bahwa seorang jurnalis muslim harus mengikuti kode etik jurnalis islam yaitu menghindari unsur olok-olok, penghinaan, mengejek, atau caci maki sehingga menumbuhkan permusuhan dan kebencian. Sehingga mereka harus cermat dalam memilah berita yang memang dibutuhkan masyarakat dan relevan untuk dijadikan sebuah berita daripada informasi dan berita-berita yang hanya akan menimbulkan masalah baru nantinya.

Pada kategori *relevance salience* ini, *republika.co.id* tetap mementingkan kefaktualan serta aktualnya sebuah peristiwa untuk dijadikan berita. Terlihat dari temuan bahwa 80% berita dari 10 sampel adalah berita yang layak dan relevan dijadikan sebuah berita konsumsi publik. Sedangkan 20 % atau 2 berita dari 10 sampel masih kurang relevan karena masih dianggap tidak penting untuk disajikan kepada masyarakat.

#### 4.2.2.2 Sub Kategori *Relative Priority* Pemberitaan penolakan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam *Republika.co.id*

Untuk kategori *Relative Priority* memiliki alat ukur yang telah diklasifikasikan ke dalam tiga indikator, yakni penting, kurang penting, dan tidak penting. Berita yang dianggap “penting” adalah berita yang terletak di halaman depan, diberi foto, mengandung judul dan subjudul. Sedangkan berita yang dianggap “kurang penting” adalah berita yang terletak di halaman depan tetapi juga tidak sampai sepertiga halaman belakang, diberi atau tidak diberi foto, ada atau tidak ada sub judul. Unit analisis yang dipakai pada kategori ini adalah per satuan berita.

**Tabel 4.15**  
**Republika.co.id : Tabel Frekuensi Kategori relevansi (*Relative Priority*)**

Konstruksi Kategori Relevance Priority	F	%
Penting	8	80%
Kurang Penting	1	10%
Tidak Penting	1	10%
Jumlah	10	100%

Keterangan berita yang dianggap “penting” jika berita terletak di halaman depan, diberi foto, mengandung judul dan subjudul. Berita dianggap “kurang penting” jika terletak di halaman depan tetapi juga tidak sampai sepertiga halaman belakang, diberi atau tidak diberi foto, ada atau tidak ada subjudul dan berita dianggap “tidak penting” jika terletak di sepertiga halaman terakhir dalam media online, diberi atau tidak diberi foto, ada atau tidak ada subjudul.

Dari 10 sampel berita yang diteliti menunjukkan bahwa berita-berita yang diberitakan oleh media [Republika.co.id](http://Republika.co.id) adalah berita-berita yang penting dan bukanlah berita yang hanya memenuhi *layout* web saja dan bersifat provokatif. Sebanyak 80% berita yang diuji adalah berita-berita penting untuk diketahui oleh masyarakat, 10% kurang penting dan 10% lagi tidak penting karena hanya memberitakan hal yang bersifat provokatif serta tidak penting untuk dibahas.

Dari sepuluh sampel ada beberapa berita yang dianggap penting sesuai dengan kesepakatan koder bahwa berita “*FPI Polisikan Ahok*” sebagai berita yang penting karena, berita ini ditampilkan pada laman web depan dan foto serta judul yang berukuran cukup besar dari berita lainnya.

Dalam buku Yunus (2010:74) menentukan layak tidaknya suatu berita untuk dipublikasikan antara lain adalah berita yang memiliki arti penting di mata pembaca/pemirsa, harus berita yang aktual serta unik, karena akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa sebuah berita harus tetap diolah dan pilah dari segi kelayakan, relevan tidaknya dan penting tidaknya untuk masyarakat.

Dalam Barus (2010:26), Assegaft menyebutkan bahwa “Berita adalah laporan tentang fakta atau ide yang terkini, yang dipilih oleh wartawan untuk disiarkan, yang dapat, menarik perhatian pembaca. Entah karena luar biasa, entah karena pentingnya atau karena akibat yang ditimbulkannya, atau mungkin karena mencangkup segi-segi *human interest* seperti humor, emosi, dan ketegangan” (jurnalistik massa kini).

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa sebuah berita akan menjadi konsumsi publik dan dianggap penting jika memenuhi semua unsur yang disebutkan seperti mempunyai arti penting bagi pembaca, unik, berdampak pada kehidupan pembaca yang di dalamnya terdapat kesamaan emosi dan lainnya.

Kemudian contoh dari berita yang disepakati pengkoder sebagai berita yang kurang penting adalah “*Habib Rizieq: Kebijakan Ahok Tak Berpihak Pada Umat Islam*”. Hal tersebut dikarenakan berita tersebut ditampilkan bukan dibagian atas pada halaman dan hanya ada bagian yang biasa seperti berita yang lainnya.

Dilihat dari sudut pandang jurnlaistik islam, seorang jurnalis harus mempunyai sifat *tabligh* (menyampaikan yang harus disampaikan). *Tabligh* sendiri mengandung makna bahwa sebaiknya kerja-kerja jurnalisme selalu berorientasi pada pemenuhan hak informasi warga sehingga pada intinya seorang jurnalis harus memberitakan berita yang penting kepada khalayak dengan memenuhi kebutuhan informasi mereka.

Dari hasil temuan diatas dapat disimpulkan bahwa Republika.co.id memberitakan kasus ini sebagai fokus utama dimana bisa dilihat bahwa dari 10

sampel yang diuji 8 diantaranya di anggap berita penting, 1 berita kurang penting dan 1 berita yang tidak penting.

Menurut Romli (dalam Mondry, 2008:132) mendefinisikan berita merupakan laporan peristiwa yang memiliki nilai berita (*news value*) – aktual, faktual, penting, dan menarik.

Sehingga bisa dikatakan berita yang penting dari semuanya yang terpenting dan memiliki kesamaan yaitu adalah menarik perhatian umum, aktual dan faktual. Republika.co.id dengan hasil temuan dari tabel frekuensi telah memenuhi syarat objektivitas sebuah media dimana diharuskan menyajikan berita yang relevan dan penting bagi masyarakat.

### 4.2.3 Kategori Berimbang

#### 4.2.3.1 Sub Kategori Proporsional Pemberitaan penolakan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam Republika.co.id

Untuk sub kategori proporsional memiliki alat ukur yang telah diklasifikasikan ke dalam dua indikator, yakni Proporsional dan Tidak Proporsional. Unit analisis yang dipakai pada kategori ini adalah per satuan berita.

**Tabel 4.16**

**Republika.co.id : Tabel Frekuensi Kategori Berimbang (Proporsional)**

<b>Kk Proporsional Media Republika.co.id</b>	<b>F</b>	<b>%</b>
Proporsional	3	30%
Tidak Proporsional	7	70%
Jumlah	10	100%

Keterangan berita yang dianggap “proporsional” jika penyajian informasi yang berimbang, adil dan tidak memihak pada pihak yang diberitakan, dan masing-masing pihak diberikan kesempatan yang sama. Berita dianggap “tidak proporsional” jika penyajian informasi yang tidak berimbang, dan memihak pada pihak yang diberitakan, dan masing-masing pihak tidak diberikan kesempatan yang sama.

Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa berita-berita mengenai penolakan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta di media *online* Republika.co.id didominasi berita yang tidak proporsional yaitu, sebanyak 70%. Kemudian berita yang proporsional atau terdapat lebih dari satu pihak sebanyak hanya 30%. Sehingga dari hasil itu dapat dikatakan bahwa berita mengenai kasus ini banyak berita yang disajikan tidak proporsional karena hanya melihat dari satu sudut pandang saja sehingga tidak berimbang antara kedua pihak.

Menurut Santosa kepala Republika perwakilan jabar (hasil wawancara, 10/04/2015) menyebutkan bahwa aspek berimbang pada sebuah berita harus ada, *“Aspek berimbang Harus ada, karena aspek berimbang menyangkut kualitas yang pada akhirnya kepercayaan dari masyarakat. Selain itu akan sangat berbahaya jika tak berimbang. Saat ini orang sangat mudahnya melakukan somasi pada media”*. Terlihat tidak sama dengan hasil yang didapat dari sepuluh sampel yang diuji dengan pernyataan tersebut, karena hanya tiga berita saja yang proporsional dan mengandung lebih dari satu pihak dalam satu berita, sisanya ada terdapat tujuh sampel yang dinyatakan tidak proporsional.

Padahal pada poin ke 8 pada sembilan elemen jurnalistik dalam buku Bill Kovach (2004) menyebutkan bahwa “Jurnalis harus membuat berita yang komprehensif dan proporsional .“ dari poin tersebut ditekankan kepada seorang jurnalis untuk membuat berita yang proporsional atau berimbang serta menyajikan berita yang bersumber dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan dan sudut pandang secara proporsional. Dalam prinsip jurnalisme Islam ada yang disebut *Shidqu* (jujur) atau yang dimaksud adalah memberitakan secara benar dan tidak berat sebelah (Zakiah, 2013).

Media *online* yang berbasis internet sangat bergantung pada alur internet yang terhubung. Menurut LaQuey dalam (Ardianto:2007) menyebutkan yang membedakan internet (dan jaringan global lainnya) dari teknologi komunikasi tradisional adalah tinggal interaksi dan kecepatan yang dapat dinikmati pengguna untuk me-nyiarkan pesannya.

Media massa dalam buku (Liliweri, 2011) terdapat aspek akurasi dimana pada media massa yang faktual, media tersebut bertanggung jawab dalam menyajikan informasi yang akurat dan tidak melakukan kecerobohan dalam penyajian fakta, apalagi penyesatan dan pemutarbalikkan fakta yang dapat merugikan seseorang, organisasi, perusahaan dan pemerintah. Jika ditunjang dengan akses media *online* yang berbasis internet yang akan mengoperasikan semuanya secara cepat baik itu menyebar atau mengakses informasi maka, pengaruh media *online* sangatlah besar. Menurut Robert G.King dalam (Yulianita, 2012) menyebutkan bahwa efek dari komunikasi massa adalah penambahan informasi, perubahan sikap dan pendapat serta perubahan perilaku.

Dari beberapa pernyataan ahli diatas disimpulkan bahwa, media massa terutama media *online* memiliki pengaruh yang besar yang dapat merubah perilaku khalayak dengan konten-konten yang ada. Sebuah media berita *online* harus menyadari hal tersebut agar tetap pada jalur yang benar dan tidak menimbulkan efek yang berakibat pada penghinaan, rasis, kerusuhan, caci-maki dan semua masalah yang akan terjadi akibat informasi yang salah dari sebuah media massa atau jurnalis. Sebaiknya sebuah media apalagi seorang jurnalis Islam harus tetap memegang teguh peranan seorang jurnalis dalam (Romli, 2003:39), seperti : pendidik (*muaddib*), pelurus informasi (*musaddid*), pembaharu (*mujaddid*), pemersatu (*muwahid*) dan juga sebagai pejuang (*mujahid*), sehingga harus tetap memperhatikan aspek keberimbangan dalam sebuah berita.

Keseluruhan pada sub kategori ini, media *republika.co.id* masih kurang memperhatikan keberimbangan sudut pandang dalam sebuah berita. Hal tersebut dilihat dari temuan diatas bahwa 70% berita dari 10 sampel, tidak proporsional. Kemudian hanya 30% saja berita proporsional dalam kasus ini yang menampilkan dua sudut pandang berbeda dari kedua pihak. Sehingga pada sub kategori proporsional *republika.co.id* tidak memenuhi syarat objektivitas karena berita mengenai penolakan Ahok sebagai gubernur ini lebih banyak dilihat dari satu pihak saja sehingga tidak berimbang dan membuat media *republika* tidak bisa disebut media yang objektif dari aspek proporsional.

#### 4.2.3.2 Sub Kategori Cover Both Side Pemberitaan penolakan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam *Republika.co.id*

Kategori *Cover Both Side* atau suatu sudut pandang dalam berita memang diperlukan untuk membuat suatu berita yang seimbang bagi media *online* *Republika.co.id*, hal ini dikarenakan dilihat dari suatu keberhasilan seorang wartawan menentukan sudut pandang yang tepat, agar dapat membuat berita yang baik dan tepat bagi pembaca. Unit analisis yang dipakai pada kategori ini adalah per satuan berita.

Tabel 4.17

**Republika.co.id : Tabel Frekuensi Kategori Berimbang (*Cover Both Side*)**

Kk <i>Cover both side</i> Media <i>Republika.co.id</i>	F	%
Satu Sudut Pandang/Pihak	9	90%
Dua Sudut Pandang/Pihak	1	10%
Jumlah	10	100%

Keterangan berita yang dianggap “satu pihak” jika hanya memuat keterangan atau informasi dari satu pihak saja, apakah itu dari salah satu pihak yang berkonflik atau pengamat saja. Berita dianggap “dua pihak” jika hanya memuat keterangan atau informasi dari dua pihak. Dalam hal ini adalah pihak yang berkonflik atau hanya memuat keterangan pengamat (yang netral) dan salah satu pihak yang berkonflik

Dari hasil tabel diatas mengenai berita yang diberitakan media *online* *Republika.co.id* dilihat hasilnya bahwa berita yang mengandung satu sudut pandang saja sebanyak 90% sangat tinggi, dan 10% yang mengandung dua sudut

pandang. Dari situ dapat dilihat bahwa di media hanya memberitakan kasus hanya dari sudut pandang pihak dari ahok saja atau dari pihak yang menolak Ahok.

Adapun berita yang didalamnya terdapat dua sudut pandang yaitu “Tolak Ahok Jadi Gubernur, Belasan Ulama Datangi DPR .” dalam berita ini terdapat dua sudut pandang dari narasumber yang bersangkutan yaitu, sudut pandang dari pihak ulama yang di wakikan oleh Fakhurrozi sebagai koordinator Gerakan Masyarakat Jakarta, dan dari pihak dari Fadli Zon yang merupakan pihak kedua dalam berita ini.

Kemudian, dalam kode etik jurnalistik yang dikutip dalam buku Yunus (2010:108) bahwa seorang wartawan harus melaporkan secara berimbang, dimana wartawan harus memegang prinsip pemberitaan yang berimbang, tanpa berpihak kepada salah satu sumber. Jika disimpulkan dari pernyataan diatas bahwa seorang wartawan harus tetap menjaga poin kode etik jurnalistik ini yaitu, keberimbangan dalam sebuah berita, sehingga tidak menimbulkan opini-opini publik yang dapat menyesatkan dan bersifat negatif yang pada akhirnya akan terkesan berpihak pada tertentu.

Jika dilihat dari sudut pandang jurnalis Islam seperti dalam buku Romli (2003 : 40) yang telah diterangkan diatas menyebutkan bahwa, peranan seorang jurnalis muslim harus menjadi pemersatu (*muwahid*), yaitu mampu menjadi jembatan yang mempersatukan umat. Oleh karena itu, kode etik jurnalistik yang berupa *impartiality* (tidak memihak pada golong tertentu dan menyajikan dua sisi dari setiap informasi [*Both Side Information*]) harus ditegakkan.

Secara keseluruhan meskipun berita yang disajikan republika.co.id adalah berita yang hanya mengandung 90 % berita dari satu sudut pandang saja. Namun, terdapat sudut pandang dari pihak ketiga yang bersifat netral tanpa berpihak kepada kedua yang sedang berseteru. Agar berita yang diberitakan tidak terkesan memojokkan salah satu pihak maka, sebaiknya republika.co.id memperhatikan aspek sudut pandang yang lebih dari satu agar didalamnya terdapat konfirmasi dari salah satu pihak dan tanggapan sehingga lebih berimbang. Meskipun demikian pada kategori ini media republika.co.id tetap memenuhi syarat objektivitas karena telah menggunakan aspek *cover both side* dalam pemberitaannya.

#### 4.2.4 Kategori Netralitas

##### 4.2.4.1 Sub Kategori Non-Evaluatif Pemberitaan Penolakan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam Media Online Republika.co.id

Untuk sub kategori non-evaluatif memiliki alat ukur yang telah diklasifikasikan ke dalam dua indikator, yakni non-evaluatif dan evaluatif. Dalam sub kategori ini, berita yang dianggap “non-evaluatif” adalah berita yang tidak ada pendapat atau “opini” dari wartawan dalam menyajikan berita, begitu pula dengan “evaluatif” berita akan dianggap demikian jika menyajikan berita yang terdapat pendapat atau “opini” dari wartawan. Unit analisis yang dipakai pada kategori ini adalah per satuan berita.

**Tabel 4.18**

**Republika.co.id : Tabel Frekuensi Kategori Netralitas (non-evaluatif)**

<b>Kk Non-Evaluatif Media Republika.co.id</b>	F	%
Evaluatif	1	10%

Non Evaluatif	9	90%
Jumlah	10	100%

Keterangan berita yang dianggap “non-evaluatif” jika tidak ada pendapat atau “opini” dari wartawan dalam menyajikan berita dan berita dianggap “evaluatif” jika ada pendapat atau “opini” dari wartawan dalam menyajikan berita.

Jika dilihat dari tabel diatas hasil dari perhitungan koder mengenai berita-berita mengenai ahok, hanya 10 % atau satu berita dari 10 sampel yang dievaluasi oleh wartawan karena terdapat pendapat atau opini dari wartawan yang membuatnya. Kemudian dari hasil diatas didapatkan 90% atau 9 berita dari 10 sampel adalah berita yang netral dari pendapat dan opini wartawannya.

Dalam Kode Etik Jurnalistik yang di kutip Yunus (2010) pada Bab II mengenai cara pemberitaan pasal 5 menyebutkan bahwa “*Wartawan menyajikan berita secara berimbang adil, mengutamakan kecermatan dari kecepatan serta tidak mencampuradukkan fakta dan opini, tulisan yang berisi interpretasi dan opini, disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya.*”

Pernyataan tersebut menekankan bahwa dalam sebuah berita tidak dibolehkan seorang wartawan mencampuradukkan fakta dan opini dari wartawan itu sendiri.

Dilihat dari hasil hitungan dapat dikatakan bahwa republika.co.id memberitakan berita yang non-evaluatif sebesar 90%, sehingga dari hasil tersebut republika.co.id dilihat dari aspek non-evaluatif telah memenuhi syarat objektivitas. Dari temuan diatas juga menunjukkan hanya ada satu berita saja

yang dianggap berita evaluatif yaitu 10% atau 1 berita dari total sepuluh sampel, menunjukkan *republika.co.id* tetap menjaga keobjektivitasan berita-berita yang mereka sajikan tanpa ada campur tangan dari wartawan ataupun media itu sendiri untuk melebih-lebihkan informasi atau menguranginya. Dari hasil temuan pada kategori non-evaluatif, *republika.co.id* telah memenuhi syarat objektivitas dengan presentase 90% berita yang tidak mengandung evaluasi tambahan dari wartawannya.

#### 4.2.4.2 Sub Kategori Non-Sensasional Pemberitaan Penolakan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam Media *Online* *Republika.co.id*

Pada Sub kategori non-sensasional memiliki alat ukur yang telah diklasifikasikan ke dalam dua indikator, yakni non-sensasional dan sensasional. Berita yang dianggap “sensasional” adalah berita yang faktanya dilebih-lebihkan dan tidak sesuai antara judul dengan isi. Namun, berita yang dianggap “non-sensasional” adalah berita yang faktanya tidak dilebih-lebihkan dan adanya kesesuaian antara judul dengan isi. Unit analisis yang dipakai pada kategori ini adalah per satuan berita.

**Tabel 4.19**

**Republika.co.id : Tabel Frekuensi Kategori Netralitas (Non-Sensasional)**

<b>Kk Non Sensasional Media Republika.co.id</b>	<b>F</b>	<b>%</b>
Sensasional	4	40%
Non Sensasional	6	60%
Jumlah	10	100%

Keterangan berita yang dianggap "non-sensasional" jika dalam berita tersebut tidak melebih-lebihkan fakta yang diberitakan dan adanya kesesuaian antara judul dengan isi dan berita dianggap "sensasional" jika dalam berita tersebut melebih-lebihkan fakta yang dibertakan dan tidak sesuai judul dengan isi.

Sebuah berita yang objektif adalah berita yang tidak ada unsur opini apalagi melebihkan sebuah fakta yang ada untuk disajikan sebagai sebuah sensasi demi menaikkan rating media. Dari hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa terdapat 40% berita yang dianggap mengandung unsur sensasional oleh koder dan 60% berita yang memuat informasi non-sensasional. Sebagai media yang sudah lama dan mempunyai kredibilitas tinggi dan dianggap netral, [republika.co.id](http://republika.co.id) tetap menjunjung tinggi tiap aspek-aspek berita dan tidak membuat berita yang bersifat sensasional apalagi berbau provokatif. Hal tersebut dilihat dari hasil temuan yang menunjukkan bahwa [republika.co.id](http://republika.co.id) memberitakan kasus penolakan ini tidak buat untuk sekedar sensasi semata.

Pada bab 1 pasal 3 dalam kode etik jurnalistik menyebutkan bahwa "Wartawan tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar) yang menyesatkan memutarbalikkan fakta, bersifat fitnah, cabul, sadis, serta sensasional."

Dari pasal tersebut bahwa sudah diatur, jika seorang wartawan tidak boleh menyiarkan karya jurnalistik yang sensasional, fitnah, sadis, cabul apalagi memutarbalikkan fakta yang bertujuan hanya untuk menaikkan rating media.

Pada kategori ini terlihat bahwa meskipun [Republika.co.id](http://Republika.co.id) merupakan media yang sudah lama dan mempunyai kredibilitas yang baik serta dipercaya oleh masyarakat. Namun, tetap masih terdapat berita yang bersifat sensasional cukup tinggi dimana hasilnya 40% atau empat berita dari 10 sampel merupakan berita yang berbau sensasional.

Dalam Zakiah (2013), disebutkan bahwa kode etik jurnalis muslim haruslah menjunjung tinggi asas-asas kejujuran dalam proses pencarian, penulisan dan penyampaian informasi. Dari sudut pandang jurnalis muslim pun dapat dinyatakan bahwa seorang jurnalis dengan latar agama harus memegang teguh kode etik jurnalis muslim ini, dimana harus tetap menjunjung tinggi asas kejujuran dalam membuat sebuah berita.

Dari hasil temuan diatas, [republika.co.id](http://republika.co.id) dalam memberitakan kasus penolakan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta dilihat dari aspek non-sensasional memenuhi syarat objektivitas. Hasil temuan menunjukkan sebesar 60 % berita didominasi berita yang non-sensasional, meskipun unsur sensasionalnya cukup besar dalam berita ini. Apalagi jika dilihat dari latarbelakang masalah yang sensitif karena mempermasalahkan kepercayaan seseorang, cukup wajar jika media membuat berita-berita yang hanya sekedar sensasi tanpa ada data dan fakta yang jelas dan relevan.

### **4.3 Pembahasan**

Dari hasil temuan uji reliabilitas penelitian dari empat kategori objektivitas menurut Watersthall yaitu, kebenaran (sub kategori faktualitas, akurasi, dan

kelengkapan berita), relevansi (sub kategori *relative salience* dan *relative priority*), berimbang (sub kategori proporsional dan *cover both side*) dan terakhir adalah Netralitas (sub kategori non-evaluatif dan non-sensasional). Media Republika.co.id masih menjunjung tinggi nilai-nilai objektivitas dalam memberitakan sebuah peristiwa dan kasus yang melibatkan permasalahan sebuah aspek agama. Media menjunjung tinggi objektivitas dalam pemberitaan, meskipun ada beberapa sub-kategori yang tidak memenuhi syarat sebagai media yang mengedepankan unsur objektivitas.

1. Temuan penelitian dari aspek kebenaran dapat dilihat bahwa dari hasil perhitungan reliabilitas antar koder ini media Republika.co.id tidak hanya mementingkan rating tetapi juga kode etik dalam pemberitaan. Kebenaran adalah aspek yang harus dan menjadi harga mati untuk sebuah berita. Menurut Zakiah (2013) dalam ranah komunikasi terdapat beberapa kemampuan berkomunikasi seperti *Qaulan sadiidan*, artinya perkataan yang benar dan bermakna harus mengikuti kaidah-kaidah ilmu atau sesuai dengan kriteria kebenaran kemudian bermakna harus jujur tidak mengandung kebohongan atau manipulasi. Kemudian dalam kode etik jurnalistik islam menurut Romli (2003) terdapat poin yang menyebutkan bahwa seorang jurnalis muslim haruslah menginformasikan atau menyampaikan informasi hanya yang benar saja tanpa ada kebohongan juga tidak merekayasa atau memanipulasi fakta yang ada. Dalam mencapai syarat objektivitas dari segi kebenaran dalam berita, dituang dengan adanya unsur-unsur faktualitas, akurasi dan kelengkapan berita.

Hasil temuan dari sub kategori kebenaran yaitu faktualitas, data valid antar koder adalah sebesar 98,15 % sehingga presentase menurut kesepakatan koder adalah sangat tinggi. Dilihat dari hasil perhitungan tabel frekuensi yang diambil dari salah seorang koder terlihat bahwa kalimat yang mengandung fakta dalam 10 sampel berita ini mendominasi dengan 46,51%, hasil tersebut menyimpulkan dalam sub kategori faktualitas media Republika sudah melakukan proses jurnalistik dengan menyampaikan informasi dengan dilandasi fakta didalamnya, sehingga memenuhi kriteria objektivitas dari segi faktualitas. Pada kode etik jurnalistik terdapat poin yang menyebutkan sebuah Pemberitaan harus bersifat Independen, yang berarti memberitakan suatu peristiwa atau fakta disesuaikan dengan suara hati nurani, tanpa adanya campur tangan maupun paksaan dari pihak manapun termasuk pemilik perusahaan media itu sendiri.

Kemudian dari segi unsur akurasi berdasarkan temuan menunjukkan bahwa media *online* republika.co.id telah memenuhi syarat objektivitas, karena berita yang disajikan mengenai masalah ini mencantumkan jati diri narasumber secara lengkap dengan hasil 90%. Sebagai syarat kriteria objektivitas, pengungkapan jati diri sangat penting untuk memenuhi hak pembaca akan informasi yang lengkap dan jelas. Dalam kode etik terdapat poin yang menyebutkan bahwa Pemberitaan haruslah akurat, dalam artian berita yang disajikan dapat dipercaya benar, yang sesuai dengan keadaan objektif, ketika peristiwa sedang

terjadi. menunjang keakurasian itu haruslah ada narasumber yang relevan untuk dijadikan sumber berita. Barus (2010:54) menyebutkan bahwa sumber berita merupakan siapa yang dinilai mempunyai posisi mengetahui atau berkompeten terhadap suatu fakta, peristiwa atau kejadian.

Dalam unsur kelengkapan, [republika.co.id](http://republika.co.id) juga telah memenuhi syarat keobjektivitasan. Hal tersebut dilihat dari hasil temuan yang menunjukkan 80% berita yang disajikan adalah berita yang lengkap 5W+1Hnya, meskipun masih tetap ada berita yang tidak mencantumkan kelengkapan informasi didalamnya dengan temuan sebesar 20%. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui apa saja informasi yang ada di media, Zakiah (2013) menyebutkan dalam prinsip jurnalistik islam terdapat istilah *tabligh*, yaitu menyampaikan apa yang harus disampaikan, sehingga kelengkapan informasi dalam sebuah berita adalah hak informasi warga yang harus dipenuhi sebagai sebuah hak yang memang harus disampaikan.

2. Kategori kedua yang dijadikan pembedah dalam penelitian ini adalah kategori relevansi yang terbagi menjadi dua sub seperti *relative salience* dan *relative priority*. Sebuah berita haruslah berisikan fakta dan pendapat dari narasumber yang terpercaya serta relevan untuk dijadikan sebuah berita. Berita yang relevan untuk disebarkan kepada khalayak haruslah berisikan kebenaran dan fakta yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Kode etik islam (Romli:2003) disebutkan poin dimana sebuah kebenaran haruslah diteliti sebelum dipublikasikan

kepada khalayak atau disebut proses *check and recheck*. Sehingga kebenaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan serta dinyatakan relevan untuk disampaikan kepada masyarakat.

Dalam unsur *relative salience* menurut penemuan yang dihasilkan dari tabel frekuensi dinyatakan memenuhi syarat objektivitas karena berita yang disajikan didominasi dengan informasi yang relevan untuk beritakan kepada khalayak. Hasil yang didapat dari temuan adalah sebesar 80% dari sepuluh sampel merupakan berita yang relevan untuk disajikan kepada masyarakat dan hanya 20% saja yang tidak relevan untuk disebarkan.

Kemudian pada aspek *relative priority*, menurut hasil temuan dari perhitungan tabel frekuensi yang diambil dari salah satu koder adalah sebesar 80% merupakan berita yang penting. Hal tersebut dilihat dari tampilan gambar dan judul yang besar membuat berita-berita tersebut dianggap penting. Hanya 10% yang kurang penting dan 10% berita tidak penting karena hanya menuturkan opini dari satu pihak saja serta hanya bersifat provokatif sehingga tidak penting bagi masyarakat. Menurut Eric C. Hepwood (Mondry, 2008:132) berita adalah laporan pertama dari kejadian yang penting dan dapat menarik perhatian umum. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa sebuah informasi dapat dikatakan sebagai sebuah berita jika merupakan dari kejadian yang penting dan menarik perhatian masyarakat luas. Menurut temuan, pada kategori ini telah memenuhi syarat keobjektivitasan dengan dominannya temuan berita-berita penting yang diberitakan oleh [republika.co.id](http://republika.co.id)

Dari kedua aspek relevansi yaitu *relative salience* dan *relative priority* disimpulkan berdasarkan temuan diatas bahwa kategori relevansi ini memenuhi syarat dan kriteria objektivitas. Media [republika.co.id](http://republika.co.id) sebagai media yang mempunyai kredibilitas baik dan sudah sangat lama, tetap memegang teguh keobjektivitasan dan bertanggung jawab dengan berita-berita yang mereka sajikan kepada masyarakat dengan menyajikan berita yang relevan dan penting untuk di informasikan kepada khalayak luas.

3. Kategori berimbang ialah kategori ketiga sebagai pembedah penelitian ini dimana didalamnya terdapat sub kategori proporsional dan *cover both side* sebagai syarat objektivitas bagi media. Kedua aspek tersebut sangat penting dalam menyajikan berita, aspek proporsional dalam berita berarti tidak memihak serta memberikan porsi yang sama kepada kedua pihak atau lebih. Kemudian pengambilan sudut pandang masalah diperlukan untuk membuat suatu berita yang seimbang, hal ini dikarenakan dilihat dari suatu keberhasilan seorang wartawan menentukan sudut pandang yang tepat, agar dapat membuat berita yang baik dan tepat bagi pembaca.

Hasil temuan pada aspek proporsional berdasarkan hitungan tabel frekuensi yang didapat dari salah satu koder, serta sudah disepakati oleh para koder adalah sebesar 30% berita yang disajikan adalah berita yang tidak proporsional. Seperti yang sudah disebut pada bab-bab diatas bahwa dalam elemen jurnalistik poin ke delapan disebutkan agar “ *jurnalisme harus menjaga agar berita tetap komprehensif dan proporsional*” (kovach

& rosentiel, 2004:6). Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa seorang jurnalis harus memiliki hal tersebut untuk bisa membuat sebuah berita yang objektif. Dalam kategori ini terdapat 70% berita yang tidak proporsional sehingga kategori ini tidak memenuhi syarat objektivitas untuk media [republika.co.id](http://republika.co.id). Prinsip jurnalistik dalam buku (Liliweri, 2011:957-959) menyebutkan bahwa terdapat poin tidak berpihak serta netral dalam menyajikan berita yang kontroversial dengan seobjektif mungkin seimbang dengan fakta dan opini secara berimbang.

Aspek *cover both side* sangat dibutuhkan untuk membuat berita yang seimbang. Dari hasil penemuan penelitian yang didasarkan pada hasil tabel frekuensi di temukan sebesar 90% berita yang disajikan [republika.co.id](http://republika.co.id) didominasi informasi dari satu sudut pandang saja. Kemudian hanya 10% saja yang mengandung lebih dari satu sudut pandang, hal tersebut menunjukkan [republika.co.id](http://republika.co.id) tidak mengemas berita dengan sudut pandang yang bagus dan dari pihak-pihak yang relevan serta layak untuk dijadikan sebuah berita. Dalam prinsip jurnalistik islam terdapat poin *fathonah* yang berarti cerdas. Dimana seorang jurnalis haruslah cerdas dalam melihat sebuah peristiwa demi tujuan kemaslahatan masyarakat banyak (Zakiah,2013). Sehingga pada intinya seorang jurnalis baik dilihat dari sudut pandang islam dan umum haruslah memiliki kecerdasan dalam membuat sebuah berita sehingga manfaat yang terdapat dalam informasi tersebut lebih berguna.

Secara keseluruhan dari kategori berimbang, keduanya tidak memenuhi syarat objektivitas. Sedangkan aspek proporsional tidak termasuk karena temuan tidak memenuhi syarat objektivitas, pada dasarnya harusnya republika.co.id perhatikan aspek ini dan berita yang disajikan akan proporsional, namun dilihat dari temuan aspek ini tidak masuk dalam kriteria objektivitas. Lebih banyak berita yang tidak proporsional atau berimbangnya dari pada berita yang proporsional kemudian lebih banyak berita yang hanya mencantumkan sumber satu sudut pandang saja ketimbang dua sudut pandang. Dalam sebuah berita yang baik adalah berita yang proporsional dan cover both sidenya lebih dari satu sudut pandang.

4. Kategori netralitas, dalam kategori ini terdapat dua sub-kategori yaitu, nonevaluatif dan non-sensasional. Dari temuan kategori ini lah dapat dilihat apakah media republika.co.id memberitakan berita dengan netral tanpa ada campur tangan kepentingan-kepentingan pihak lain.

Pada aspek non-evaluatif berdasarkan temuan dari tabel frekuensi diatas didapatkan hasil 10% berita dianggap evaluatif atau terdapat pendapat atau “opini” dari wartawan dalam menyajikan berita dan 90% berita dianggap non-evaluatif atau tidak ada pendapat atau “opini” dari wartawan dalam menyajikan beritanya. Temuan tersebut menunjukkan media *online* republika.co.id mengedepankan aspek netralitas dimana meskipun terdapat emosi yang sama dengan pihak penggugat namun republika mampu memposisikan diri sebagai media netral yang

memberitakan sesuai dengan fakta dan data dilapangan. Hasil yang didapat berkorelasi dengan pernyataan Santosa kepala Republika perwakilan jabar dimana *“republika adalah media umat. Republika tidak melihat apa agama Ahok atau siapapun tokoh ya ada. Selama ia bagus dan bisa membawa perubahan. Walaupun Islam kalau misalnya ngawur...ya tentunya harus kita luruskan dan kita kritik”* (hasil wawancara, 10/04,2015). Dari temuan pada aspek non-evaluatif ini dinyatakan telah memenuhi syarat sebuah objektivitas, dimana republika.co.id tetap mengedepankan berita yang berkualitas dari pada berita yang bersifat provokatif yang pada akhirnya akan terjadi fitnah-fitnah.

Pada sub kategori non-sensasional berdasarkan temuan penelitian dari hasil tabel frekuensi didapatkan 40% berita merupakan berita yang sensasional dan 60% berita mengandung berita non-sensasional. Hasil tersebut menyatakan bahwa repulika.co.id memberitakan kasus ini tidak hanya bersandar pada masalah yang sensasional tetapi juga berlandaskan pada data dan fakta yang ada dilapangan. Hal tersebut menunjukkan rapublika.co.id tetap mengedepankan kode etik profesi jurnalistik dalam membuat sebuah berita yang berkualitas. Pada bab 1 pasal 3 dalam kode etik jurnalistik menyebutkan bahwa *“Wartawan tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar) yang menyesatkan memutarbalikkan fakta, bersifat fitnah, cabul, sadis, serta sensasional.”* Begitu pula dalam kode etik jurnalistik islam dimana seorang jurnalis harus menghindari kata dengan maksud olok-olok, penghinaan,

mengejek, mencaci-maki sehingga menimbulkan permusuhan dan kebencian. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa sebuah berita tidak boleh bersifat sensasi belaka karena didalam berita yang hanya berbau sensasi pasti akan ada kata-kata dengan maksud yang negatif atau provokatif sehingga menimbulkan permasalahan yang lebih besar lagi. Dengan presentase yang dominan yaitu 60%, maka pada aspek non-sensasional media *republika.co.id* memenuhi syarat objektivitas sebuah media *online*.

Secara keseluruhan pada kategori netralitas ini, media *online* *republika.co.id* telah memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai media yang objektif. Terlihat dari hasil temuan-temuan pada kategori ini bahwa 90% berita tidak mengandung evaluatif wartawan dan media itu sendiri dan 60% temuan menunjukkan berita tidak mengandung berita yang sensasional semata. Sehingga kategori netralitas ini keseluruhan telah memenuhi syarat untuk dinyatakan masuk kedalam kriteria objektivitas media dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil temuan tersebut sejalan dengan kegiatan jurnalistik berpegang teguh pada kode etik jurnalistik pada bab ii pasal 5 yaitu : *“Menyajikan berita secara berimbang adil, mengutamakan kecermatan dari kecepatan serta tidak mencampuradukkan fakta dan opini. Tulisan yang berisi interpretasi dan opini, disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya.”*

Jika dilihat secara keseluruhan meskipun terdapat beberapa kategori yang masih belum memenuhi syarat objektivitas namun, media [Republika.co.id](http://Republika.co.id) tetap berpegang pada aspek-aspek objektivitas dalam membuat berita yang baik. Peran [Republika.co.id](http://Republika.co.id) sendiri dalam kasus ini sangat baik meskipun media ini bernapaskan islam dan dihadapkan pada permasalahan mengenai keyakinan antar umat beragama namun, tetap masih berpegang teguh pada etika jurnalistik yaitu, menyampaikan kebenaran dan tidak mencampuradukkan opini dari jurnalis, tidak berpihak dan netralitas terhadap permasalahan serta dari kepentingan-kepentingan pihak lainnya.

Sebuah media harus menyampaikan informasi selengkap mungkin ke pada khalayak karena itu merupakan hak publik untuk mendapatkan informasi. Seperti yang tertera dalam UU tentang penyiaran dijelaskan pada Bab iii mengenai Hak dan Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik Serta Hak dan Kewajiban Badan Publik, Bagian Kesatu Hak Pemohon Informasi Publik Pasal 4 pada bagian (1) dan (2) dimana poinnya menyebutkan bahwa pada poin (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang . Poin (2) Setiap Orang berhak: a. melihat dan mengetahui Informasi Publik.

Kemudian pada pasal 28F UUD 1945. Menyebutkan bahwa Informasi yang diperoleh setiap warga Negara haruslah yang benar, jelas dan jujur. Sama halnya dengan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, nomor 32 tahun 2002, tentang penyiaran, bab ii mengenai asas, tujuan, fungsi, dan arah. Pada

Pasal 5 poin i disebutkan bahwa media massa harus memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab.

Menurut undang-undang tersebut dilihat bahwa setiap orang berhak mendapatkan informasi dari sebuah media massa. Informasi yang didapat oleh publik haruslah informasi yang benar, seimbang, bertanggungjawab, jelas dan jujur. Republika jika dilihat dari hasil temuan keseluruhan telah menyiarkan informasi secara objektif dilihat dari empat kategori uji dan sembilan sub-kategori uji dimana hampir semuanya telah memenuhi syarat objektivitas. Sehingga republika.co.id telah menjalankan tugas media massa sebagaimana yang telah diatur dalam UUD 1945 seperti pada pasal 28 F dan UU nomor 32 mengenai penyiaran pada bab 2 pasal, termasuk informasi-informasi yang harus dipenuhi dan diketahui oleh publik.

Pada dasarnya Republika.co.id sebagai media massa yang mempunyai fungsi *to inform, to educate, to influence* dan *to entertain* harus tetap berpegang teguh pada regulasi yang ada. Baik itu dalam mencari sebuah berita dan pada saat proses penyebaran informasi tersebut, meskipun pada implementasinya, berjalan atau tidaknya fungsi jurnalistik tersebut sangat dipengaruhi oleh dua aspek yaitu visi dan misi lembaga media sebagai pelaku jurnalistik itu sendiri.

Pada konteks fungsinya, aktivitas jurnalistik harus mengacu pada prinsip dasar aktivitas jurnalistik. Dalam Yunus (2010) Ada tiga prinsip dasar, yaitu faktual, akurat dan objektif. Tanpa dasar ini jurnalistik akan kehilangan fungsinya sebagai pemberi dan penyalur informasi kepada masyarakat. Prinsip objektif

dalam aktivitas jurnalistik mengacu pada penyajian informasi yang tidak berpihak, bukan yang berdasar pada subyektivitas. Objektivitas pada jurnalistik dapat dipelihara dengan menghindari intervensi dan manipulasi data dalam penyajian berita, disamping tetap mempertahankan realitas dan orisinalitas.

Etika jurnalistik dapat diartikan sebagai sistem nilai atau norma yang menjadi acuan para pers dalam menjalankan tugas dan fungsi jurnalistik. Tanggung jawab wartawan dan media massa untuk dapat menciptakan dan mendukung pengembangan kehidupan sosial yang lebih baik melalui penyebaran berita dan pemberian informasi yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, oleh karena itu kode etik jurnalistik memegang peranan penting. Republika.co.id sebagai media umat juga harus tetap berpegang pada kode etik jurnalis muslim dimana terdapat beberapa poin yang ditekankan seperti, tidak berbohong dan memanipulasi fakta, bijaksana, meneliti kebenaran berita atau fakta, hindari berita yang berbau penghinaan, dan hindarkan prasangka buruk. Kemudian setidaknya tetap pada alur peranan sebagai media umat yang mempunyai fungsi pendidik (*muaddib*), pelurus informasi (*musaddid*), sebagai pembaharu (*mujaddid*), sebagai pemersatu umat (*muwadid*) dan sebagai pejuang (*mujahid*).

Harus di ingat bahwa media massa memiliki peran dan pengaruh besar dalam membentuk opini publik melalui berita yang disajikannya. pengaruh yang ditimbulkan dapat berdampak positif ataupun negatif. Penerapan kode etik jurnalistik yang konsisten dan penuh komitmen pada akhirnya akan menghasilkan persepsi masyarakat tentang praktik dan perilaku jurnalistik yang objektif dan

profesional. Indikatornya terlihat pada hasil berita yang memiliki kualitas, berbobot dan independensi.

Republika.co.id yang merupakan media *online* yang mempunyai kredibilitas tinggi, netral dan independen terhadap segala macam permasalahan politik yang mengklaim sebagai media umat dan representasi media islam harus tetap mempertahankan segala aspek dan etika dalam memberitakan peristiwa tanpa ada campur tangan opini dari wartawan serta kepentingan tertentu. Kemudian republika.co.id seharusnya lebih mengedepankan aspek proporsional dalam berita dan *cover both side* yang memunculkan lebih dari satu sudut pandang agar objektivitas medianya sendiri dapat diperkuat dengan kedua aspek tersebut. selain itu para jurnalis republika sendiri harus tetap memiliki sifat-sifat sesuai dengan prinsip jurnalistik Islam meliputi : *Shidqu* (jujur). Dalam hal ini jurnalisme yang memberitakan secara benar dan tidak berat sebelah, *Amanah* (dapat dipercaya). Amanah berarti menjaga *trust* (kepercayaan) yang diberikan oleh masyarakat kepada pihak jurnalis, *Tabligh* (menyampaikan yang harus disampaikan). Tabligh sendiri mengandung makna bahwa sebaiknya kerja-kerja jurnalisme selalu berorientasi pada pemenuhan hak informasi warga, *Fathonah* (cerdas). Fathonah berarti kecerdasan dan kelincahan kerja-kerja jurnalisme dalam menyampaikan berita dan opini, bagi kemaslahatan masyarakat banyak.(Zakiah, 2013)

Dari hasil temuan penelitian, [republika.co.id](http://republika.co.id) yang merupakan media umat dan representasi media Islam ini tidak terpengaruh dengan kasus penolakan Ahok yang jelas menyinggung aspek keyakinan umat lain. [Republika.co.id](http://Republika.co.id) tetap memberitakan berita melihat dari apa yang terjadi tanpa melihat latarbelakang seseorang, agama seseorang atau kelompok tertentu namun, tetap objektif dengan tetap memberitakan kebenaran yang ada, memberitakan apa adanya tanpa ada yang dlebihkan dan dikurangi. Jelas dari hasil temuan tersebut [republika.co.id](http://republika.co.id) telah menerapkan visi mereka yaitu [Republika](http://Republika) sebagai media umat yang terpercaya dan mengedepankan nilai-nilai universal yang sejuk, toleran, damai, cerdas, dan profesional, namun mempunyai prinsip dalam keterlibatannya menjaga persatuan bangsa dan kepentingan umat Islam yang berdasarkan pemahaman *Rahmatan Lil Alamin* yaitu Rahmat bagi semua makhluk didunia.

Terlepas dari hasil penelitian yang Berdasarkan hasil temuan uji reliabilitas koding yang menyatakan bahwa [republika.co.id](http://republika.co.id) dalam pemberitaan penolakan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta telah memenuhi syarat objektivitas, tidak lepas dari upaya serta peran masyarakat sebagai pembaca. Seorang pembaca berita harus jeli, cerdas dalam beropini dan berkomentar serta melek akan media, sehingga dapat memantau dan mengkritik kinerja media-media yang hanya syarat kepentingan tertentu.